

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

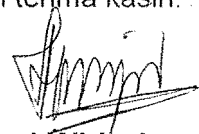
NOTA DINAS
NOMOR: 244 /Dt.8.1.ND/11/2017

Kepada Yth. : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
Dari : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan
Hal : Tanggapan Surat dari Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian
Keuangan perihal Pengusulan Hibah ADB TA 9391-INO: *Knowledge and Support TA for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project-Requested for No. Objection*
Tanggal : 6 November 2017

Menindaklanjuti nota dinas Saudari nomor 454/Dt.8.4.ND/10/2017 tertanggal 27 Oktober 2017 perihal Permintaan Tanggapan Surat dari Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan perihal Pengusulan Hibah ADB TA 9391-INO: *Knowledge and Support TA for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project-Requested for No. Objection*, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Merujuk kepada nota dinas Direktur Pangan dan Pertanian nomor 360/Dt.3.1.ND/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 menyebutkan bahwa usulan kegiatan hibah ini merupakan bagian dari Pinjaman Luar Negeri untuk kegiatan IPDMIP, untuk itu mohon klarifikasi Saudari apakah hibah ini merupakan bagian dari kegiatan IPDMIP. Apabila usulan kegiatan hibah ini merupakan bagian dari kegiatan IPDMIP, maka yang menjadi *executing agency* adalah penanggung jawab kegiatan IPDMIP tersebut.
2. Terkait isu mengenai *executing agency*, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 1 kegiatan hanya ada 1 *executing agency* pada tingkat/level Kementerian/Lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Adapun pihak-pihak lainnya termasuk *executing agency*, dapat juga menjadi *implementing agency*.
3. Selanjutnya mengenai usulan Kem. PPN/Bappenas sebagai *executing agency* pada kegiatan ini, menurut pendapat kami kiranya perlu ditelaah lebih lanjut mengenai kesesuaian ruang lingkup kegiatan yang diusulkan dengan tugas dan fungsi Kem. PPN/Bappenas.
4. Dapat kami sampaikan pula sebagaimana diatur dalam Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 4 Tahun 2016, untuk kegiatan dimana Kem. PPN/Bappenas menjadi *executing agency* perlu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Ortala terkait pengusulan dan persiapan kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudari diucapkan terima kasih.

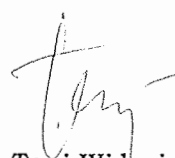

Teni Widuriyanti

Tembusan Yth.:

1. Bapak Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan (sebagai laporan)
2. Direktur Pangan dan Pertanian
3. Direktur Pengairan dan Irigasi
4. Kepala Biro Perencanaan dan Ortala

LEMBAR EDARAN

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Nomor Agenda	Diterima Tanggal	Tingkat Surat
1477/Dt.8.1/10/2017	31 Oktober 2017	Rahasia / Segera / Biasa
<p>Diterima dari : Direktur Pangan dan Pertanian</p> <p>No. / Tgl Surat : 360/Dt.3.1.ND/10/2017 31 Oktober 2017</p> <p>Perihal : Executing Agency untuk Hibah ADB TA 9391-INO: Knowledge and Support TA for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project</p>		
Diteruskan Kepada :		Disposisi :
<input type="checkbox"/> 1. Tati Lies Aryati <input checked="" type="checkbox"/> 2. Riza Hamzah <input type="checkbox"/> 3. Mukhtiali <input type="checkbox"/> 4. Sugeng Wahyu Hendarto <input type="checkbox"/> 5. Beby Hanzian <input type="checkbox"/> 6. Yustina Handayani Wijayanti <input type="checkbox"/> 7. Tien Iswartini <input type="checkbox"/> 8. Dadan Kusdarsana <input type="checkbox"/> 9. Ino Sutrisno Staf Pendukung <input type="checkbox"/> 1. Firman Perangin-angin <input type="checkbox"/> 2. Adi Nurhadi <input checked="" type="checkbox"/> 3. Eftin Ula Kurnia <input type="checkbox"/> 4. Sahna Putri Aselira <input type="checkbox"/> 5. Bonataon M.T.V. Simandjorang <input type="checkbox"/> 6. Pristi N.K. Panggabean <input type="checkbox"/> 7. Kristianto Wibowo <input checked="" type="checkbox"/> 8. Muhamad Faisal Siddiq <input type="checkbox"/> 9. Derry Afriandri <input type="checkbox"/> 10. Reezali Raharjaya <input type="checkbox"/> 11. Faizah Aulia Rahmah		<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/> Untuk Dikoreksi <input type="checkbox"/> Teliti/Pendapat dan Laporkan <input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban <input type="checkbox"/> Dibahas Bersama <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Untuk Dipergunakan <input type="checkbox"/> Ikuti Perkembangan <input type="checkbox"/> Copy dan Kembalikan <input type="checkbox"/> Hadiri/Wakili <input type="checkbox"/> Untuk di File
<p>Catatan :</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  2/11/2017 Teni Widuriyanti </div>		

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

No. 36 /Dt.3.1.ND/10/2017

Kepada Yth. : Sdri. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
Dari : Direktur Pangan dan Pertanian
Perihal : *Executing Agency* untuk Hibah ADB TA 9391-INO: *Knowledge and Support TA for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project*.
Tanggal : 31 Oktober 2017

Menjawab Nota Dinas Saudari No. 454/Dt.8.4.ND/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Permintaan Tanggapan Atas Surat dari Plt Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan perihal Pengusulan Hibah ADB TA 9391-INO : *Knowledge and Support TA for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project- requested for No. Objection*, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat kegiatan tersebut merupakan bagian hibah dari IPDMIP, dimana *Executing Agency* (EA) dari kegiatan tersebut berada di Kementerian PUPR, maka kami mengusulkan agar Direktorat Pengairan dan Irigasi dapat menjadi EA dari hibah tersebut. Dengan demikian, koordinasi di antara kedua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu antara kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman ADB dan kegiatan yang dibiayai melalui hibah ADB.
2. Selanjutnya, kami akan mendukung kegiatan tersebut melalui koordinasi dengan BPSDMP Kementerian Pertanian selaku salah satu *Implementing Agency* (IA) hibah tersebut. Peran BPSDMP Kementerian Pertanian sangat strategis di dalam kegiatan hibah tersebut mengingat mempunyai kewenangan teknis di dalam pengembangan kelompok tani dan kapasitas penyuluhan pertanian.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudari kami ucapkan terima kasih.



Sri Yanti JS

Tembusan Yth.:

1. Bapak Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
2. Sdr. Direktur Pengairan dan Irigasi.
3. Sdr. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan.

LEMBAR EDARAN

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Nomor Agenda	Diterima Tanggal	Tingkat Surat
1464/Dt.8.1/10/2017	27 Oktober 2017	Rahasia / <u>Segera</u> / Biasa
<p>Diterima dari : Dir. Multilateral</p> <p>No./ Tgl Surat : 454/Dt.8.4.ND/10/2017 27 Oktober 2017</p> <p>Perihal : Permintaan Tanggapan Atas Surat dari Plt. Dir. Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan perihal Pengusulan Hibah ADB TA 9391-INO: Knowledge and Support TA for Leveraging Information and Communication</p>		
Diteruskan Kepada :		Disposisi :
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Tati Lies Aryati <input checked="" type="checkbox"/> 2. Riza Hamzah <input type="checkbox"/> 3. Mukhtiali <input type="checkbox"/> 4. Sugeng Wahyu Hendarto <input type="checkbox"/> 5. Beby Hanzian <input type="checkbox"/> 6. Yustina Handayani Wijayanti <input type="checkbox"/> 7. Tien Iswartini <input type="checkbox"/> 8. Dadan Kusdarsana <input type="checkbox"/> 9. Ino Sutrisno Staf Pendukung <input type="checkbox"/> 1. Firman Perangin-angin <input type="checkbox"/> 2. Adi Nurhadi <input checked="" type="checkbox"/> 3. Eftin Ula Kurnia <input type="checkbox"/> 4. Sahna Putri Aselira <input type="checkbox"/> 5. Bonataon M.T.V. Simandjorang <input type="checkbox"/> 6. Pristi N.K. Panggabean <input type="checkbox"/> 7. Kristianto Wibowo <input type="checkbox"/> 8. Muhamad Faisal Siddiq <input type="checkbox"/> 9. Derry Afriandri <input type="checkbox"/> 10. Reezali Raharjaya <input type="checkbox"/> 11. Faizah Aulia Rahmah		<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/> Untuk Dikoreksi <input type="checkbox"/> Teliti/Pendapat dan Laporkan <input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban <input type="checkbox"/> Dibahas Bersama <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Untuk Dipergunakan <input type="checkbox"/> Ikuti Perkembangan <input type="checkbox"/> Copy dan Kembalikan <input type="checkbox"/> Hadiri/Wakili <input type="checkbox"/> Untuk di File
<p>Catatan :</p> <p>(i) Cek, kegiatan persusunya apa.</p> <p>(ii) Siapa yg terlibat dgn ke beneficiary & melalui TA ini</p> <p>(iii) Cek skema channeling spt apa</p> <p>(iv) EA hanya 1, yg berperan sbg koordinator kegiatan spt manfaat dgn ke beneficiary.</p> <p>Siapkan ND ke Dir Mult EA thl brs 2, tgl IA brs.</p> <p style="text-align: right;">Teni Widuriyanti 11/10/17</p>		

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
NOMOR: 454/Dt.8.4.ND/10/2017

KepadaYth. : 1. Direktur Pangan dan Pertanian;
2. Direktur Pengairan dan Irigasi;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan.

Dari : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral

Perihal : Permintaan Tanggapan Atas Surat dari Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan perihal Pengusulan Hibah ADB TA 9391-INO:
*Knowledge and Support TA for Leveraging Information and Communication
Technology for Irrigated Agricultural Information Project – Requested for
No. Objection*

Tanggal : 27 Oktober 2017

Sehubungan dengan surat dari Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan Nomor: S-895/PR.2/2017, tanggal 19 Oktober 2017 (terlampir), disampaikan bahwa *Country Director* ADB telah menyampaikan permintaan *No.-Objection* atas TA 9391-INO: *Knowledge and Support TA for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project* yang telah disetujui oleh ADB pada tanggal 27 September 2017 kepada Kementerian Keuangan.

Kegiatan hibah ini bertujuan untuk mengembangkan mekanisme penyampaian informasi kepada petani sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup para petani dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan hasil panen. Pendanaan kegiatan ini akan bersumber dari *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR) dan dilaksanakan oleh ADB.

Perlu menjadi perhatian, terkait dengan isu yang disampaikan dalam surat dimaksud yaitu: pengusulan 2 (dua) *executing agency* dan pencantuman daftar *ineligible expenditure* untuk hibah yang bersumber dari JFPR dan pengusulan kegiatan tersebut ke dalam dokumen perencanaan hibah (DRKH).

Terkait dengan hal di atas, mohon tanggapan Saudara berkaitan dengan isu-isu tersebut untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Agustin Arry Yanna



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTUR PINJAMAN DAN HIBAH

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 6, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710
TELEPON (6221) 3459289, 3865330; FAKSIMILE (6221) 3812859; SITUS www.djopr.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 895 /PR.2/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : TA 9391-INO: *Knowledge and Support Technical Assistance for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project - Request for No Objection*

19 Oktober 2017

Yth.

Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta

Menunjuk surat *Country Director, Indonesia Resident Mission – Asian Development Bank* (IRM-ADB) nomor 01/L/TA9391/2017 tanggal 11 Oktober 2017 hal tersebut di atas (salinan terlampir), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

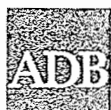
1. Melalui surat *Country Director* IRM-ADB tanggal 11 Oktober 2017 tersebut di atas, ADB meminta *No-Objection* atas TA 9391-INO: *Knowledge and Support Technical Assistance for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project* yang telah disetujui ADB pada tanggal 27 September 2017, sekaligus melampirkan TA *Report* berkenaan.
2. Kegiatan hibah TA 9391-INO bertujuan untuk mengembangkan mekanisme penyampaian informasi kepada para petani sesuai kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup para petani dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun kemampuan untuk meningkatkan hasil panen. Hibah senilai USD2 juta ini bersumber dari *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR) untuk diadministrasikan dan dieksekusi oleh ADB (rincian profil hibah terlampir).
3. Berdasarkan TA *Report* hibah dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, antara lain:
 - a. Pencantuman 2 (dua) *Executing Agency* (EA) kegiatan TA, yaitu Direktorat Pengairan dan Irigasi serta Direktorat Pangan dan Pertanian, di Bappenas. Hal ini tidak lazim dan dikhawatirkan dapat menjadi hambatan implementasi kegiatan mengingat tidak ada unit utama sebagai koordinator. Demikian pula dari sisi administratif, pencatatan hibah pada sistem *database* kami (DMFAS) hanya memungkinkan perekaman 1 (satu) EA.
 - b. Pencantuman Daftar *Ineligible Expenditure* untuk hibah yang bersumber dari JFPR, sebagaimana disebutkan pada bagian C: *Cost and Financing*, kiranya perlu menjadi pedoman bagi *Executing Agency* dalam memanfaatkan TA dimaksud.

Lampiran Surat Direktur Pinjaman dan Hibah
Nomor : S-395/PR.2/2017
Tanggal : 19 Oktober 2017

Profil TA 9391-INO:

Knowledge and Support Technical Assistance for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project

a.	Nama Hibah	: <i>Knowledge and Support Technical Assistance for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project.</i>
b.	Jenis Kegiatan	: <i>Knowledge and Support Technical Assistance (KSTA)</i> , dieksekusi oleh ADB
c.	Jumlah/Resource Pendanaan	: USD 2,000,000 / <i>Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR)</i> yang akan diadministrasikan oleh ADB. Pemerintah akan menyediakan dukungan pendamping untuk ruangan kantor, gaji dan kontribusi lainnya (<i>in-kind contribution</i>) sebesar USD 200,000.
d.	Tujuan Proyek	: Untuk mengembangkan mekanisme penyampaian informasi kepada para petani sesuai kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup para petani dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun kemampuan untuk meningkatkan hasil panen.
e.	Output Proyek	: 1. Pengembangan model dan strategi TIK untuk pertukaran informasi pertanian, 2. Penyediaan informasi berkonteks khusus yang berbiaya rendah, tepat waktu dan dapat dilindaklanjuti.
f.	<i>Executing Agency</i>	: Direktorat Pengairan dan Irigasi - Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana serta Direktorat Pangan dan Pertanian - Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas
g.	<i>Implementing Agency</i>	: Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi dan Kabupaten terkait.
h.	Lokasi	: 3 Kabupaten lokasi proyek IPDMIP yang mempunyai potensi tinggi untuk peningkatan produksi, profitabilitas dan penghasilan petani kecil.
i.	<i>Implementation Period</i>	: September 2017 s.d. September 2020.



INDONESIA RESIDENT MISSION

11 October 2017
Ref 01/L/TA9391/2017

Mr. Suminto

Acting Director of Loans and Grants

Director General of Budget Financing and Risk Management

Ministry of Finance

Gedung Frans Seda, 6th floor

Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat

Dear Mr. Suminto:

**TA 9391-INO: Knowledge and Support Technical Assistance for Leveraging Information
and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project
– Request for No Objection**

We are pleased to inform you that on 27 September 2017, the Asian Development Bank (the ADB) approved the provision of knowledge and support technical assistance (the Technical Assistance) to the Government of Indonesia (the Government) in an amount not exceeding the equivalent of US\$2,000,000 for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project.

As indicated in the Technical Assistance Report, the Directorate of Water Resources and Irrigation and Directorate of Food and Agriculture of the National Development Planning Agency (BAPPENAS) will be the executing agency for the Technical Assistance. The cost estimates and financing plan and the outline terms of reference for consultants to be engaged under the Technical Assistance are in Appendixes 2 and 3 of the Technical Assistance Report. The government will provide in-kind contribution.

The Technical Assistance will be financed on a grant basis by the Japan Fund for Poverty Reduction administered by ADB.

Ms. Uzma Hoque, Senior Social Sector Specialist, Indonesia Resident Mission will be responsible for all matters pertaining to the implementation of the Technical Assistance. Therefore, all communications on this matter may be addressed to her at uhoque@adb.org.

Sincerely,

Winfried F. Wicklein
Country Director
Indonesia Resident Mission

ASIAN DEVELOPMENT BANK

INDONESIA RESIDENT MISSION

The Plaza Office Tower, 11th floor

Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350, Indonesia

Tel: +62 21 2992 7388 Fax: +62 21 2992 7399

www.adb.org/indonesia

Attachments: Appendix 1 – Approved Technical Assistance Report
Appendix 2 – Cost Estimates and Financing Plan
Appendix 3 – Outline Terms of Reference for Consultants

cc: Mr. Abdul Malik Sadat Idris, Director of Water Resources and Irrigation, BAPPENAS
Ms. Sri Yanti, Director for Food and Agriculture, BAPPENAS
Ms. Agustin Arry Yanna, Director of Multilateral Foreign Financing, BAPPENAS
Mr. Imam Santoso, Director General of Water Resources, Ministry of Public Works and Housing
Mr. Agus Suprpto Kusmulyono, Director for Water Resources Management, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Housing
Mr. Mohammad Zainal Fatah, Assistant for the Deputy of Water Resources Infrastructure, Coordinating Deputy for Accelerating Infrastructure and Regional Development, Coordinating Ministry for Economy
Jiangfeng Zhang, Director, ADB Southeast Asia Department, Environment, Natural Resources and Agriculture Division

UZH/BNH:uh *JA*

We confirm that we have no objection to the inclusion of the Republic of Indonesia in the TA 9391-INO: Knowledge and Support Technical Assistance for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information Project.

On behalf of the Government of Indonesia

Name and Signature: _____

Designation: _____

Date: _____

Cc:



Technical Assistance Report

Project Number: 51158-001
Knowledge and Support Technical Assistance (KSTA)
September 2017

Republic of Indonesia: Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information (Financed by the Japan Fund for Poverty Reduction)

This document is being disclosed to the public in accordance with ADB's Public Communications Policy 2011.

Asian Development Bank

CURRENCY EQUIVALENTS

(as of 1 September 2017)

Currency unit	–	rupiah (Rp)
Rp1.00	=	\$0.0000749
\$1.00	=	Rp13,352

ABBREVIATIONS

ADB	–	Asian Development Bank
BAPPENAS	–	<i>Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional</i> (National Development Planning Agency)
ICT	–	information communication technology
MOA	–	Ministry of Agriculture
TA	–	technical assistance

NOTE

In this report, "\$" refers to US dollars.

Vice-President	S. Groff, Operations 2
Director General	R. Subramaniam, Southeast Asia Department (SERD)
Director	W. Wicklein, Country Director, Indonesia Resident Mission, SERD
Team leader	U. Hoque, Senior Social Sector Specialist, SERD
Team members	U. Hendrarini, Senior Operations Assistant, SERD
	E. Quincieu, Senior Water Resources Specialist, SERD
	R. Verdillo, Senior Operations Assistant, SERD

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

CONTENTS

	Page
KNOWLEDGE AND SUPPORT TECHNICAL ASSISTANCE AT A GLANCE	
I. INTRODUCTION	1
II. ISSUES	1
III. THE TECHNICAL ASSISTANCE	3
A. Impact and Outcome	3
B. Outputs, Methods, and Activities	3
C. Cost and Financing	4
D. Implementation Arrangements	4
IV. THE PRESIDENT'S DECISION	5
APPENDIXES	
1. Design and Monitoring Framework	6
2. Cost Estimates and Financing Plan	9
3. List of Linked Documents	10

KNOWLEDGE AND SUPPORT TECHNICAL ASSISTANCE AT A GLANCE

1. Basic Data		Project Number: 51158-001	
Project Name	Leveraging Information Communication and Technology for Irrigated Agricultural Information Capacity Development	Department /Division	SERD/IRM
Nature of Activity		Executing Agency	National Development Planning Agency (BAPPENAS)
Modality	Regular		
Country	Indonesia		
2. Sector	Subsector(s)	Financing (\$ million)	
✓ Agriculture, natural resources and rural development	Irrigation		2.00
		Total	2.00
3. Strategic Agenda	Subcomponents	Climate Change Information	
Inclusive economic growth (IEG)	Pillar 2: Access to economic opportunities, including jobs, made more inclusive	Climate Change impact on the Project	Low
4. Drivers of Change	Components	Gender Equity and Mainstreaming	
Knowledge solutions (KNS)	Application and use of new knowledge solutions in key operational areas	Effective gender mainstreaming (EGM)	✓
Partnerships (PAR)	Civil society organizations Implementation Private Sector		
5. Poverty and SDG Targeting		Location Impact	
Geographic Targeting	Yes	Not Applicable	
Household Targeting	No		
SDG Targeting	Yes		
SDG Goals	SDG2		
6. Risk Categorization	Low		
7. Safeguard Categorization	Safeguard Policy Statement does not apply		
8. Financing			
Modality and Sources	Amount (\$ million)		
ADB	0.00		
None	0.00		
Cofinancing	2.00		
Japan Fund for Poverty Reduction	2.00		
Counterpart	0.00		
None	0.00		
Total	2.00		

I. INTRODUCTION

1. The proposed knowledge and support technical assistance (TA) will improve the delivery of information to farmers to help enhance their livelihoods. The TA will strengthen the existing use of information and communication technology (ICT) to deliver low-cost, timely, and actionable extension information to smallholder farmers specific to their needs, to increase their ability to improve yields.¹ The TA builds on and strengthens the outcomes of the loan for the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program, to maximize investments in infrastructure development and value chain services, improving the delivery of extension information to farmers and building the capacity of extension workers.² The TA locations will overlap with the program in three districts to identify locations, crops, and strategic value chains with high potential to improve production, increase profitability, and boost incomes for smallholders.³ The TA is aligned with the priorities of Asian Development Bank (ADB) country partnership strategy for Indonesia, 2016–2019, and included in ADB's country operations business plan, 2017–2019 for Indonesia.⁴

II. ISSUES

2. Agriculture plays an important role in Indonesia's efforts to improve food security, reduce poverty, and promote inclusive growth. Agriculture employs 39 million people (almost a third of the total workforce) and is the main source of employment in rural areas. In March 2017, about 13.9% of the rural population was classified as poor, compared to 7.7% of the urban population.⁵ However, productivity in agriculture is very low.⁶ Efforts to boost agricultural productivity include increasing smallholder yields, focusing production on high-value crops, developing agro-industry, and reducing post-harvest and value chain waste. These investments are important to optimize agricultural production and increase farm incomes and rural employment, which will positively impact the growth of the nonfarm sector.

3. Agriculture in Indonesia is dominated by smallholder farmers.⁷ However, smallholders face challenges in increasing productivity and commercializing their produce. One way to boost smallholders' agricultural productivity and diversification is to address their inadequate access to value or supply chain inputs, quality irrigation infrastructure, finance, and, in particular, extension technology, services, and information. The Government of Indonesia has undertaken a range of investments to strengthen irrigation management and agricultural value chain development (footnote 2); yet, millions of smallholder farmers remain unable to maximize opportunities and capture the economic benefits of these investments. A key problem is the insufficient access to

¹ Agricultural extension refers to the application of scientific research and knowledge to agricultural practices to increase productivity through dissemination of information, provision of technical support, and education to farmers.

² ADB. 2017. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the Republic of Indonesia for the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*. Manila (Loans 3529 and 8327-INO, approved by the Board on 18 May 2017). The International Fund for Agricultural Development is providing parallel financing to the Ministry of Agriculture (MOA) to improve the delivery of agricultural services.

³ To be determined by the assessment in the first phase of TA implementation.

⁴ ADB. 2016. *Country Partnership Strategy: Indonesia, 2016–2019: Towards a Higher, More Inclusive and Sustainable Growth Path*. Manila. The TA first appeared in the business opportunities section of ADB's website on 1 August 2017.

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia (Indonesian Central Bureau of Statistics). Social and Population Statistics. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494> (accessed 31 August 2017).

⁶ In 2016, agriculture accounted for 13.5% of Indonesia's gross domestic product. World Bank. *World Development Indicators*. <http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS>. (accessed 24 August 2017). Annual productivity in agriculture (\$3,000 per worker) is very low compared to neighboring countries like Malaysia, where the annual value added per worker is \$9,000. McKinsey Global Institute. 2012. *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. <http://www.mckinsey.com/global-themes/asia-pacific/the-archipelago-economy>

⁷ Over 90% of crops are cultivated by smallholders, except oil palm. The main crops are rice, soybean, corn, coffee, cocoa, fruits, and vegetables, which are high-value produce and offer strong prospects to smallholders.

and exchange of up-to-date extension information.

4. Farmers need access to and the ability to exchange up-to-date information on (i) local sources, availability, and costs of inputs for production to minimize their dependence on intermediaries; (ii) different techniques and technologies for increasing productivity and diversifying into more commercial crops; (iii) real-time weather reports, cropping patterns, and soil and water management to cope with climate variability; (iv) crop and food processing to add value to their raw produce; (v) food storage to minimize post-harvest losses; and (vi) marketing and links to markets to maximize profitability.

5. On the supply side, the flow and exchange of information rely on a conventional extension services approach whereby extension workers travel to rural areas to train farmers on new technologies and improved farm management. However, this approach is limited in terms of reach and quality.⁸ Key constraints faced by extension workers include (i) limited technology training and access to information, (ii) inadequate communication skills, (iii) insufficient transport budgets to reach farmers spread out over large areas, and (iv) limited monitoring capacity. The government also needs more feedback as to the viability of its investments and policies.⁹ Decentralization has weakened the agricultural public extension system, and heightened the gaps and disparities among regions. The impact of the fragmented institutional setup combined with the lack of information further limits the ability of many farmers to escape poverty.

6. **Current initiatives, lessons, and synergy.** The TA draws upon the knowledge base and experience of ADB and other key stakeholders. Current initiatives include (i) Cyber Extension, a national, web-based, agricultural information portal run by the Ministry of Agriculture (MOA) for farmers at the district level through 5,568 rural extension centers; (ii) the AgriFin Mobile program supported by Mercy Corps that provides bundled and customized farm management tools and financial services to smallholder farmers using both regular and android phones; and (iii) other web-based platforms developed by universities. Lessons learned include the following: (i) any intervention should be financially affordable for farmers and extension workers; (ii) the engagement of a local knowledge provider, including the private sector, is essential to provide cutting-edge, up-to-date information; (iii) any intervention should be user-friendly, reliable, and backed by trusted, neutral sources of information; and (iv) capacity development and the engagement of farmers and key stakeholders will create ownership and lead to sustainability.¹⁰ The TA will build on the AgriFin model and ensure that Cyber Extension provides a back-up database for the substantive technology content.

7. **Innovation and sustainability.** There is high demand to improve the provision of information to farmers.¹¹ The project builds on the preliminary concept of AgriFin and expands its services.¹² Key innovative elements include (i) the provision of specific local market information

⁸ There is a wide disparity in the education and skill levels of the 28,000 government extension workers employed to support 71,000 villages. Most are able to provide general information but lack skills in high-value commodities.

⁹ Only 45% of the nation's irrigation system is functioning at full capacity. It is essential to enhance real-time information exchange among farmers, water user associations, and irrigation commissions to improve the operation and maintenance of irrigation systems.

¹⁰ ADB. 2011. *Completion Report: Poor Farmers' Income Improvement through Innovation Project*. Manila.

¹¹ Farmers and extension workers agree that mobile phones are a key tool to reach farmers. 85% of Indonesia's population own mobile phones and 43% carry smart phones. Judith Balea. 2016. The Latest Stats and in Web and Mobile in Indonesia (Infographic). *Tech in Asia*. 28 January. <https://www.techinasia.com/indonesia-web-mobile-statistics-we-are-social/>; According to a survey carried out by Chinese Internet giant Baidu among 11,000 respondents across Indonesia, around 60% access the internet via smart phones. Resto Woro Yuniar. 2014. Indonesia's Mobile Internet Users. *The Wall Street Journal*. 5 December. <https://blogs.wsj.com/briefly/2014/12/05/indonesias-mobile-internet-users-the-numbers/>

¹² AgriFin provides financial information and limited advisory agriculture services only. This does not include the full

and linkages with markets, (ii) platforms to link farmers with value chain groups and irrigation authorities, and (iii) a public-private partnership model to support the provision of agricultural information to farmers through mobile phones. The system will be technically and financially viable and may lead to mass commercial uptake. Key factors that will support the project's sustainability include (i) demand-driven support to introduce innovative solutions to large numbers of farmers, (ii) an exit strategy that supports financial and commercial viability in the value chain,¹³ (iii) consultation of and effective engagement with key stakeholders to ensure that developed models are accepted, (iv) a strong monitoring and evaluation system to ensure that needed results are achieved, and (v) capacity building for all stakeholder institutions and building of national champions along with parallel training and support for farmers in utilizing ICT services for sustainability.

III. THE TECHNICAL ASSISTANCE

A. Impact and Outcome

8. The TA is aligned with the following impact: rural incomes, food security, and livelihoods improved (2015–2019 National Medium-Term Development Plan and 2005–2025 Long-Term National Development Plan). The TA will have the following outcome: management of agricultural extension information services in three districts in rural Indonesia improved.¹⁴

B. Outputs, Methods, and Activities

9. **Output 1: Model and strategy developed for using information and communication technology for agricultural information exchange.** This output will (i) review initiatives on the use of ICT in agriculture, covering technological, institutional, financial, and economic aspects; (ii) consult relevant agencies and private providers; (iii) identify the farmers' specific knowledge requirements and constraints on access to information; (iv) develop criteria and identify project locations and beneficiaries; (v) build on the AgriFin and Cyber Extension models, and identify appropriate technologies to process and deliver this knowledge; (vi) assess the feasibility and sustainability of such technologies; and (vii) prepare a capacity development plan for the use of ICT services by extension workers and farmers.

10. **Output 2: Context specific, low-cost, timely, and actionable information provided.** This output will implement the ICT model in three districts.¹⁵ Key activities will include (i) facilitating an agreement between the MOA and a mobile network provider to provide a financially feasible package for farmers and extension workers; (ii) upgrading the application and developing substantive content; (iii) developing standard operating procedures; (iv) developing training of

range of services needed by farmers, such as information and linkage with input suppliers, buyers, and irrigation authorities, among others. The TA builds on this model by including additional services.

¹³ The exit strategy will be based on (i) an agreement with a mobile network operator to provide an affordable internet package based on farmers' and extension workers' willingness to pay (preliminary discussions indicate that extension workers are willing to pay \$10–\$15 and farmers \$5–\$10 per month for the use of mobiles); (ii) minimal transaction fees levied on key stakeholders, other than farmers, at various points of the value chain, such as buyers, input providers, and commercial banks. In addition, Cyber Extension will provide a back-up database for the substantive technology content. The TA will ensure that the exit strategy is tested and refined during project implementation.

¹⁴ The design and monitoring framework is in Appendix 1.

¹⁵ The project services will reach approximately 100,000 farmers in the selected districts. Each district is assumed to have the following average number of farmers: (i) 80,000 in Java, (ii) 10,000 in Sumatra, and (iii) 10,000 in Eastern Indonesia.

trainers¹⁶ and other capacity development activities for the applications and services;¹⁷ (v) field facilitation and monitoring of all activities; (vi) establishing a project monitoring system, and developing and maintaining a monitoring and evaluation database that includes farmer profiles; and (vii) developing and implementing an exit strategy. The output will also analyze monitoring and evaluation data emanating from the TA, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program, and other interventions to identify and undertake thematic studies on key issues for policy advocacy pertinent to the whole sector.

C. Cost and Financing

11. The TA is estimated to cost \$2,200,000, of which \$2,000,000 will be financed on a grant basis by the Japan Fund for Poverty Reduction and administered by ADB. Key expenditure items are listed in Appendix 2.

12. Under the Japan Fund for Poverty Reduction, ineligible expenditures include (i) purchase of vehicles, (ii) salaries for civil servants, (iii) foreign travel, (iv) scholarships or long internships, (v) detailed engineering design, (vi) civil works and other related expenses, and (vii) those under ADB's List of Ineligible Items (or Negative List) and Prohibited Investment Activities List.¹⁸

13. The government will provide counterpart support in the form of office space, counterpart salaries, and other in-kind contributions.

D. Implementation Arrangements

14. ADB will administer the TA. The Southeast Asia Department will select, supervise, and evaluate consultants. The executing agency will be the Directorate of Water Resources and Irrigation and Directorate of Food and Agriculture of the National Development Planning Agency (*Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional* [BAPPENAS]). Activities will be coordinated with relevant agencies such as the MOA, Ministry of Public Works and Housing, Ministry of Home Affairs, and provincial and district agencies. A steering committee chaired by BAPPENAS will provide overall strategic and policy guidance.¹⁹

15. Consulting services. All consultants will be engaged by ADB in accordance with ADB's Procurement Policy and Procurement Regulations for ADB Borrowers (2017), and will work on an intermittent basis, unless otherwise required by the TA. Consulting services under the TA will be engaged on output-based or lump-sum contracts to reduce the administrative burden and improve economy, efficiency, and value for money. All firms will be recruited using quality- and cost-based selection with a standard quality ratio of 90:10.²⁰ The copyright on application developed under

¹⁶ Trainers will be sourced from existing national and local agricultural training institutes, the core group of extension workers and progressive farmers, Cyber Extension staff, and others as appropriate, as per the initial assessment report.

¹⁷ Financial literacy for agricultural training institutes, Cyber Extension staff, extension workers, and farmers.

¹⁸ Japan Fund for Poverty Reduction. 2017. *Policy Guidelines for Technical Assistance Grant*.

¹⁹ Members of the steering committee will include the MOA; Ministry of Public Works and Housing; Ministry of Home Affairs; Agency for the Assessment and Application of Technology; Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency; the Ministry of Villages; and other agencies identified by BAPPENAS to support smooth project implementation.

²⁰ Terms of Reference for Consultants (accessible from the list of linked documents in Appendix 3). Three firms will be mobilized to support the TA activities: (i) one principal firm or implementing partner to coordinate and support the delivery of all of the TA outputs (\$916,925), (ii) a second firm specializing in agricultural extension content development (\$208,600), and (iii) a third firm for developing and implementing ICT applications (\$279,000). For the thematic studies under output 2, a lump-sum package is included (\$400,275), under which a firm or individual consultants will be hired based on the topics of thematic studies to be commissioned. This will be determined during

the TA and its use will be agreed upon and stated in a contractual agreement in accordance with ADB's policies and guidelines. The proceeds of this TA will be disbursed in line with the Technical Assistance Disbursement Handbook (2010, as amended from time to time). The TA will provide no physical asset.

Implementation Arrangements

Aspects	Arrangements		
Indicative implementation period	September 2017–September 2020		
Executing agency	BAPPENAS		
Implementing agencies	The Ministry of Agriculture and the Ministry of Public Works and Housing		
Consultants	To be selected and engaged by ADB		
	QCBS	366 person-months	\$1,404,525
	QCBS or ICS	147 person-months	\$400,275
Advance contracting	Advance contracting will be conducted for the principal coordinating firm.		
Disbursement	The TA resources will be disbursed following ADB's <i>Technical Assistance Disbursement Handbook</i> (2010, as amended from time to time).		

ADB = Asian Development Bank, BAPPENAS = *Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional* (National Development Planning Agency), ICS = individual consultant selection, QCBS = quality- and cost-based selection, TA = technical assistance.

Source: Asian Development Bank.

IV. THE PRESIDENT'S DECISION

16. The President, acting under the authority delegated by the Board, has approved ADB administering technical assistance not exceeding the equivalent of \$2,000,000 to the Government of Indonesia to be financed on a grant basis by the Japan Fund for Poverty Reduction for Leveraging Information and Communication Technology for Irrigated Agricultural Information, and hereby reports this action to the Board.

Takehiko Nakao
President

27 September 2017

implementation.

DESIGN AND MONITORING FRAMEWORK

Impacts the TA is Aligned with			
Rural incomes, food security, and livelihoods improved (2015–2019 National Medium-Term Development Plan and 2005–2025 Long-Term National Development Plan) ^a			
Results Chain	Performance Indicators with Targets and Baselines	Data Sources and Reporting	Risks
Outcome Management of agricultural extension information services in three districts in rural Indonesia improved	By March 2020: a. 70% of extension workers (40% of whom are female) in the TA districts have increased access to and knowledge of cutting-edge farm management practices, ICT, and mobile services (2016 baseline: 0) b. 70% of farmers (40% of whom are female) in the TA districts report satisfaction with ICT and mobile extension services (2016 baseline: 0)	a–b. TA monitoring and completion reports and interviews with extension workers, farmers, and value chain service providers and beneficiaries	Inadequate coordination with government counterparts and key stakeholders for the delivery of TA activities and outputs
Outputs 1. Model and strategy for using ICT for agricultural information exchange developed 2. Context-specific, low-cost, timely, and actionable extension information provided	By April 2018: 1. An ICT and mobile application model covering technology, institutional, financial, economic, and gender aspects developed and endorsed by the Government of Indonesia and functioning (2016 baseline: 0) By December 2019: 2a. Context-specific and updated extension information disseminated at least weekly to farmers, extension workers, and other stakeholders (2016 baseline: 0) 2b. 70% of farmers (40% of whom are female) in TA areas reached through ICT and mobile extension services (2016 baseline: 0)	1. Report on strategy and model development 2a–2c. Interviews with farmers and various stakeholders, and TA monitoring reports	Adequate assessments of and corresponding plans for the financial feasibility and commercial viability of the various activities are not undertaken. Lack of commitment and engagement of the various government and private sector stakeholders regarding the TA activities

Results Chain	Performance Indicators with Targets and Baselines	Data Sources and Reporting	Risks
	2c. A functioning value chain stakeholders' mobile platform established (2016 baseline: 0)		
<p>Key Activities with Milestones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model and strategy for using ICT for agricultural information exchange developed <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Recruit international consultant and national firms (Q3 2017). 1.2 Undertake desk review of past and ongoing initiatives on the use of ICT in agriculture (Q4 2017). 1.3 Conduct consultations with farmers (including women), relevant agencies (including input suppliers, financiers, and buyers), and private providers (Q4 2017). 1.4 Undertake field visits to identify farmers' needs, issues, and constraints in accessing information (Q4 2017). 1.5 Identify appropriate ICTs to deliver extension information services and assess technological, financial, and social sustainability (Q4 2017). 1.6 Develop a framework for public-private partnerships for the delivery of ICT services (Q4 2017). 1.7 Identify TA project locations, beneficiaries, crops, and strategic value chains to be supported (Q4 2017). 1.8 Prepare a final report on strategy for ICT and mobile extension services (Q1 2018). 1.9 Ensure that gender issues are mainstreamed in all consultations, needs assessments, strategies, and service development (Q4 2017 and Q1 2018). 2. Context specific, low-cost, timely, and actionable extension information provided <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Based on the above, develop a time-bound detailed implementation schedule, detailed work plans, an output list of all TA staff and consultants, and implementation arrangements with relevant government and private sector agency endorsements regarding the TA activities, timeline, and collaboration (Q1 2018). 2.2 Develop the module content and database for extension information (Q2 2018). 2.3 Develop mobile and ICT (web-based) applications (for daily tips and expert guidance) and various platforms for the delivery of information to stakeholders, such as farmer groups (including women) farmers, value chain groups, and market links (Q2 2018). 2.4 Develop standard operating procedures for the module content and applications (Q2 2018). 2.5 Develop short training courses for field support staff, the core group of extension workers, and farmers in the use of mobile applications (Q2–Q3 2018). 2.6 Implement an ICT model or strategy (Q3 2018). 2.7 Establish a gender-disaggregated TA performance management system (Q1 2018). 2.8 Identify key themes critical for policy advocacy and strengthen the implementation of research (Q1 2018). 2.9 Identify and recruit consultants and/or a firm, as needed (Q2 2018). 2.10 Research and prepare documents (2018–2019). 2.11 Present and disseminate the research study (Q1 2020). <p>TA Management Activities</p> <p>Identify, recruit, and train the executing and implementing agencies (Q3–Q4 2017).</p> <p>Recruit consulting services and specialists (Q3 2017).</p> <p>Provide gender training for the TA management and implementation units, consultants, and implementation team (Q2 2018).</p> <p>Hold biannual planning meeting and review steering committee meetings (2017–2020).</p> <p>Develop and implement an exit strategy (Q3 2018–Q2 2020).</p> <p>Carry out a midterm evaluation (by 2018) and submit a completion report (Q2 2020).</p>			

<p>Inputs:</p> <p>Japan Fund for Poverty Reduction: \$2,000,000^b</p> <p>Note: The government will provide counterpart support in the form of office space, counterpart salaries, and other in-kind contributions.</p>
<p>Assumptions for Partner Financing</p> <p>Not Applicable.</p>

ICT = information and communication technology, Q = quarter, TA = technical assistance.

^a Government of Indonesia. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (National Medium-Term Development Plan), 2015–2019. Jakarta; and Government of Indonesia. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun* (Long-Term National Development Plan), 2005–2025. Jakarta.

^b Administered by the Asian Development Bank.

Source: Asian Development Bank.

COST ESTIMATES AND FINANCING PLAN
(\$'000)

Item	Amount
Japan Fund for Poverty Reduction ^a	
1. Consultants	
a. Remuneration and per diem	
i. International consultants	270.48
ii. National consultants	1,228.97
b. Out-of-pocket expenditures	
i. International and local travel	126.75
ii. Training, seminars, and conferences	170.60
iii. Reports and communications	8.00
iv. Miscellaneous administration and support costs	13.31
2. Contingencies	181.89
Total	2,000.00

Note: The technical assistance is estimated to cost \$2,200,000, of which contributions from the Japan Fund for Poverty Reduction as presented in the table above. The Government of Indonesia will provide counterpart support in the form of office space, counterpart salaries, and other in-kind contributions. The value of government contribution is estimated to account for about 9% of the total technical assistance cost.

^a Administered by the Asian Development Bank.

Source: Asian Development Bank estimates.

LIST OF LINKED DOCUMENTS

<http://www.adb.org/Documents/LinkedDocs/?id=51158-001-TARreport>

1. Terms of Reference for Consultants

Supplementary Documents

2. Detailed Product Services to be Provided to Technical Assistance Beneficiaries
3. Stakeholder Implementation Chart for the Technical Assistance

TERMS OF REFERENCE FOR CONSULTANTS

1. Three firms will be mobilized to support the technical assistance (TA) activities. For the thematic studies under Output 2, a lumpsum package is included, under which a firm or individual consultants will be hired based on the topics and types of thematic studies to be commissioned—this will be determined during implementation. It is estimated that consulting services will total approximately 528 person-months (p-m) (International: 15 p-m; National: 513 p-m), including the thematic package. The firms will be specialized in agricultural extension content development, mobile applications development and management of overall Information and Communication Technology (ICT) and agriculture TA.
2. The firms will be recruited using the quality-and cost-based selection (QCBS) method with standard quality ratio of 90:10 and shall conform to Asian Development Bank (ADB) procedures. The firms will possess adequate qualifications, expertise and experience to perform the services. Individual consultants, if engaged, will be engaged on an intermittent basis using the individual consultant selection (ICS) method in accordance with ADB's Procurement Policy and Procurement Regulations for ADB Borrowers (2017).
3. The terms of reference (TOR) for the consulting services is provided below. The proceeds of this TA will be disbursed in line with the Technical Assistance Disbursement Handbook (2010, as amended from time to time).
4. Training, consultations, workshops will be organized by ADB or by the consultants in accordance with ADB's Procurement Policy and Procurement Regulations for ADB Borrowers (2017) as appropriate. The team will coordinate closely with the National Development Planning Agency (BAPPENAS), Ministry of Agriculture (MOA), Ministry of Public Works and Housing (MPWH) and other key stakeholders.

I. Consulting Firms

A. Principal Coordinating Firm

5. A firm will be mobilized to manage the day to day operations of the TA. An indicative list of team members in the Principal Coordinating Firm are listed below. These positions are identified as required positions to deliver the services. Except for these 7 experts, the proposing firms may determine the number and nature of any additional team members required to deliver the TA objectives and outputs.

Table 1: Required Team Members for Implementing Partner

Expertise	Person-Months
International Team Leader – ICT and Agriculture Expert	15
National Agriculture Expert/Adviser	12
National Team Leader – Agriculture Extension Services Management Specialist	32
Monitoring and Evaluation Specialist	22
Field Officers – training and monitoring (6 persons: 2 per district)	80

Source: Asian Development Bank

1. International Team Leader – ICT and Agriculture Expert (15 p-m)

6. The expert will work closely with BAPPENAS and MOA and will assume primary responsibility for overseeing the management and implementation of the entire TA. In undertaking the assigned project management tasks, the International Team Leader (ITL) will coordinate with appropriate executing agency (EA)/implementation agency (IA) staff and work closely with and be supported by the National Deputy Team Leader (NTL) and National Agriculture Adviser (NAA).

7. Specific tasks include:

- (i) Prepare a comprehensive assessment report on using ICT for agricultural extension information services to farmers covering farmer's needs, technology, institutional, financial and economic aspects, including constraints, success factors and upscaling potential. The assessment will also form the baseline for the project.
- (ii) Develop a strategy and sustainable and effective model for leveraging ICT use of mobile phones for agricultural extension information, with inputs from the consulting team and all key stakeholders.
- (iii) Prepare comprehensive selection criteria for identifying (i) poor beneficiaries; (ii) commodities/crops and strategic value chains; and (ii) districts to be included in the project.
- (iv) In coordination with the NTL, NAA and in close coordination with EA/IA, develop and monitor rolling annual work plans, budgets, and monitor activity implementation.
- (v) Supervise and coordinate the work of all consultants, and ensure that the consultants' outputs are in accordance with agreed Terms of Reference and project requirements.
- (vi) Prepare and regularly review the consultants' personnel schedule to coordinate EA/IA and consultants' inputs and respond to changing project circumstances if and when these occur.
- (vii) Oversee and provide inputs into all assessments, substantive content development, ICT/mobile applications development, capacity development plan and training modules/ material development, PPP agreements and implementation Memorandum of Understandings/agreements signed with government and other key stakeholders; all aspects of implementation, including, field supervision; mid-term and end TA reviews.
- (viii) Supervise the ICT applications development and implementation.
- (ix) Develop an exit/sustainability strategy and ensure implementation of the sustainability strategy in the second year of implementation.
- (x) Ensure gender issues are analyzed and mainstreamed into all assessments, approach and activities.
- (xi) Set up a project monitoring framework based on the project design and monitoring framework and guide and coordinate with EA/IA and consultants in monitoring project performance, including implementation of the gender targets on a biannual basis.
- (xii) In cooperation with the NTL, take the lead in reviewing and consolidating all consultant's reporting submissions and preparation and consolidation into integrative high quality reports in accordance with agreed reporting schedules, including quarterly and biannual progress reports, to be submitted to ADB on behalf of the EA.
- (xiii) Coordinate with key development partners and initiatives on the project.

- (xiv) Share, integrate and adapt international best practices and lessons learned from similar projects in ICT and agriculture.
- (xv) Participate in biannual planning and review meetings.
- (xvi) Support the EA/IA with compliance with ADB TA covenants, assurances, as well as with national and provincial policies and regulations.
- (xvii) Oversee and participate in the implementation of project activities including training and meetings, as reasonably requested.
- (xviii) Undertake other specific technical management inputs where these may be required.
- (xix) Develop a strategic communication strategy and guide its implementation to share the outputs and outcomes of the project.
- (xx) Prepare a knowledge product on the project highlighting innovations and results.
- (xxi) Prepare a completion report that includes lessons learned, and other recommendations that would ensure that the gains achieved from the technical assistance are fully institutionalized.

8. **Preferred Qualifications and Experience:** The expert should have at least 10 years professional experience in ICT and agricultural extension services, developing and managing ICT/mobile based agricultural extension services in emerging economies. She/he should have at least a master's degree in agriculture or related field. She/he should have knowledge of gender issues in agriculture. An understanding of the government processes, social and cultural environment in Indonesia would be an advantage. Knowledge of ADB and/or official development assistance TA administration procedures and experience of implementing TAs financed by the Japan Fund for Poverty Reduction would be an advantage. The ITL should have understanding and skills related to gender and development issues.

9. The ITL will report to EA/IA and the ADB TA officer. Assignment will be in Jakarta, Indonesia on an intermittent basis over a 48-month period from quarter 4, 2017 to mid-2019.

2. National Agriculture Expert/ Adviser (12 p-m)

10. The expert will work closely with BAPPENAS, MOA, MWPH, Ministry of Home Affairs (MOHA), the International Team Leader (ITL) and the National Team Leader (NTL).

11. Specific tasks include:

- (i) Support the ITL and NTL in carrying out overall assessment to inform strategy and model design and provide expert inputs into the overall strategy, model and identification of project commodities, beneficiaries and locations.
- (ii) Identify and select agencies to undertake the content development packages.
- (iii) Provide expert guidance on identification of crops and strategic value chains which have high potential for improved production, increased profitability and higher income for smallholders.
- (iv) Provide oversight/supervision of all substantive content or modules for ICT/mobile based agricultural extension services, for the TA.
- (v) Supervise all training/transfer-operate-transfer (TOT) conducted by content development experts/ trainers for beneficiaries, trainers, etc.
- (vi) Together with the NTL, prepare the overall capacity development plan/ strategy for farmers and extension workers.
- (vii) Provide expert inputs into the sustainability/ exit strategy.

- (viii) Identify, engage and maintain networks with international, national and local knowledge providers.
- (ix) Analyze TA monitoring and evaluation (M&E) data and provide recommendations for policy reform, e.g., subsidies, delivery mechanism, etc.
- (x) Liaise and coordinate with government and key academic/ research stakeholders.
- (xi) Participate in and assist with the implementation of project activities including training and meetings, including bi-annual planning and review meetings, as reasonably requested.
- (xii) Support the implementation of the communication strategy.

12. **Preferred Qualifications and Experience:** The expert should have at least 10-years professional experience in agricultural sector, developing and managing agricultural/ irrigation extension content. She/he should have at least a master's or PhD degree in agriculture. Knowledge of cutting edge agricultural/irrigation technology, agriculture and irrigation extension history and developments, government processes, social and cultural environment in Indonesia is required. Excellent verbal and written English skills is required

3. National Team Leader (NTL) – Agriculture Extension Services Management Specialist, (32 p-m)

13. The NTL will assist the ITL to manage and implement the TA, including overall supervision of all the consultants. The NTL will support the EA/IA implement, coordinate and provide day-to-day substantive inputs in the implementation of activities.

14. Specific tasks include:

- (i) Provide inputs and support ITL in undertaking assessment and model/ strategy development.
- (ii) Manage all national consultants and consulting agencies and be responsible for the expedient mobilization of the project.
- (iii) Supervise ICT/mobile applications development.
- (iv) Oversee/ manage relationship with mobile network operators.
- (v) Supervise the monitoring and evaluation (M&E) specialist and development of sex disaggregated M&E database and its maintenance.
- (vi) Develop the capacity development plan, manage all training and capacity development activities, including training modules development; training of trainers of trainers; field officers, farmers, extension workers, cyber extension staff, provincial and district government staff, etc. Adapt existing financial literacy training materials, train field officers and/or coordinate with training institutes or NGOs to provide financial literacy training to project beneficiaries.
- (vii) Coordinate linkage with IFAD initiatives, MFIs for credit access for farmers.
- (viii) Supervise field facilitation, and monitoring of all activities and budgets, including content training and applications use.
- (ix) Ensuring that gender analysis and mainstreaming are adequately undertaken in all activities.
- (x) Provide inputs and supervise the implementation of the exit/sustainability strategy in the second year of implementation.
- (xi) Oversee monitoring and recording of all activities, including profiles of farmers supported by the TA.
- (xii) Organize bi-annual planning and review meetings with all TA stakeholders.

- (xiii) Provide support to relevant ministries in developing and implementing an agreement with mobile network operator (MNO) for a providing a financially affordable mobile/internet package for farmers and extension workers.
- (xiv) Facilitate agreements with private sector IT applications agencies related to copyright of applications/platforms developed, adhering strictly to ADB rules and regulations on the issue. The copyright on application developed under the TA and their use will be agreed and stated in contractual agreement in accordance with ADB's policies and guidelines
- (xv) Coordinate with all relevant government agencies, at national, provincial, district and village levels, BAPPENAS, the MOA and MPWH in implementing all activities
- (xvi) Coordinate with MOA on synchronizing data/content and update of Cyber Extension
- (xvii) Coordinate with all relevant TA stakeholders during regular implementation as well as part of bi-annual planning and review meetings
- (xviii) Prepare bi-annual work plans and monitoring reports to ADB and EA and IA on TA activities and results, including annual reports, mid-term review reports and the final TA completion report
- (xix) Support the development of the communication strategy and ensure its implementation.
- (xx) Undertake any other activity as required for smooth and effective implementation of the TA.

15. **Preferred Qualifications and Experience:** Degree in environment, agriculture and natural resources, with experience in developing and managing projects on ICT based agricultural extension services. At least 8 years of in-country experience in Indonesia. The National Team Leader (NTL) will be based in Jakarta. Excellent verbal and written English skills is required

4. National Monitoring and Evaluation (M&E) Specialist (22 p-m)

16. The M&E Specialist will work closely with BAPPENAS, MOA, MPWH, the ITL, NTL and NAA.

17. Specific tasks include:

- (i) Set up the TA sex disaggregated M&E database.
- (ii) Develop M&E templates for field staff for gathering data.
- (iii) Record all activities and result by farmer, crop, location, gender and other variables as developed for the M&E framework and maintain a database of farmer profiles.
- (iv) Train project field officers on using M&E procedures and guidelines, templates, gathering and analyzing data.
- (v) Ensure integration/ institutionalization and synchronization of all project M&E data with cyber extension, EA/IA M&E and other relevant government databases.
- (vi) In collaboration with NTL and NAA, explore relevant government or other institutions' databases/ systems for institutionalization of M&E data.
- (vii) Train MOA, MPWH and MOHA staff in maintaining the database and analyzing the data.
- (viii) Prepare monthly monitoring reports of all activities.
- (ix) Provide substantive inputs into all planning and review meetings and activities as well as bi-annual, annual monitoring reports as well as mid-term and end project review reports.
- (x) Support the implementation of the communication strategy.

- (xi) Undertake any other activity as required.

18. **Preferred Qualifications and Experience:** Degree in a relevant field of Monitoring System with professional related experiences in PPMS for at least 5 years. Experience in ICT and agriculture would be an advantage. Good verbal and English written skills required.

- 5. **Team of Six Field Officers - training and monitoring (2 per district) (National, 80 p-m)**

19. The consultants will be based in the TA locations, support implementation and undertake monitoring of all activities.

20. Specific tasks include:

- (i) Work closely with NTL, consultants and others to monitor quality, scope, participation, and impact of program activities.
- (ii) Support ITL, NTL and NAA to conduct assessments to identify, target beneficiaries, locations, agricultural commodities, value chains, etc.
- (iii) Establish farmer's groups and facilitate farmers access of all the ICT/ mobile based services and manage day to day queries and support required.
- (iv) Build knowledge and local networks on all input suppliers, markets/ buyers and MFIs and facilitate smooth access to and interface with farmers and as well as based on local contexts advise NTL and suggest updates to content and applications development.
- (v) Plan, coordinate and organize all trainings, workshops, and other events. Provide training to relevant stakeholders, on content, applications as well as on financial literacy
- (vi) Monitor and record all activities and submit bi-monthly (every 2 weeks) to the NTL and M&E specialist.
- (vii) Undertake any other activity as required.

21. **Preferred Qualifications and Experience:** Degree in social sciences or community-based development activities with relevant field experience of at least 3 years in implementation and monitoring. Good verbal and written English skills is required

B. Consulting Firm for Substantive Content Development

22. One firm will be mobilized that is specialized in agricultural extension content development

- 1. **Team of three experts and three research consultants on Content Development (National, 40 p-m for experts and 60 p-m for research consultants; total 100 p-m)**

23. The experts will be responsible for overall content development.

24. Specific tasks include:

- (i) Undertake mapping and review of related/ similar current initiatives and source of agricultural technology data/ information.
- (ii) Identify crops and strategic value chains which have high potential for improved production, increased profitability and higher income for smallholders.

- (iii) Develop content/modules for agricultural technology and cutting edge farm management practices for crops selected, ensuring gender issues are integrated in all content developed.
- (iv) Identify key experts to support farmers question and answer (Q&A)/helpline and establish process for helpline.
- (v) Provide expert advice to support the farmers' Q&A/ helpline.
- (vi) Provide TOT training to field facilitators, key pool extension worker trainers, key pool of national and provincial Cyber Extension staff, key pool of farmer peer trainers.
- (vii) Undertake field training and monitoring visits.

25. Specific tasks of the research consultants:

- (i) Undertake mapping of similar/related initiatives and content providers both at the local and national levels.
- (ii) Gather data and undertake initial analysis of all data related to similar initiatives, crops, value chains, etc.
- (iii) Arrange consultation with key stakeholders.
- (iv) Support experts in preparing module content.
- (v) Maintain and monitoring the farmers' helpline.
- (vi) Undertake field monitoring.

26. **Preferred Qualifications and Experience:** For Experts: Master's Degree in environment, agriculture and natural resources, with experience in developing and managing training content on agricultural extension services. At least 10 -15 years of experience. Excellent verbal and written English skills is required.

27. For research consultants: Degree in environment, agriculture and natural resources, with experience in developing and managing training content on agricultural commodities and value chains for extension services. At least 5 years of experience.

C. Consulting Firm for Application Development and Maintenance

1. Team of three experts and three assistant operators on Mobile Application Development and Maintenance (National, 60 p-m for experts and 60 p-m for assistant operator consultant; total 120 p-m)

28. The experts, together with assistant operators will be responsible for overall mobile application development and maintenance.

29. Specific tasks of the ICT mobile experts include:

- (i) In coordination with International Fund for Agricultural Development (IFAD), develop/adapt mobile applications to register farmers, value chain service providers, buyers and other participants.
- (ii) Develop the farmers profile database.
- (iii) Develop the various platforms, including farmers' Q&A helpline interface; farmers' peer group; value chain platform linking farmers, irrigation authorities, input providers, processing facilities, traders, entrepreneurs; linkages with markets and market information (through Ministry of Trade and other private sector sites/links).
- (iv) Establish reporting procedures on data quality and level of entry.

- (v) In collaboration with M&E specialist, support the development of a dashboard and reporting templates to monitor key indicators of the project.
- (vi) Prepare training modules and technical references.
- (vii) Provide technical support to M&E specialist to support institutionalization and synchronization of data with cyber extension and other EA/IA and relevant government databases. Support the migration of data sets into the these identified databases.
- (viii) Provide inputs the ICT for extension services model/ strategy on an ongoing basis and into exit/ sustainability strategy.
- (ix) Provide training and field monitoring support, etc.

30. Specific tasks of the Assistant ICT operators include:

- (i) Daily maintenance of ICT applications database.
- (ii) Maintenance of smooth dissemination of daily and weekly tips on content.
- (iii) Researching and accessing information at both national and local levels, of all value chain service providers, buyers/markets, microfinance institutions and related agencies/ civil society organizations working in ICT and agriculture.
- (iv) Maintenance and smooth functioning of all the various platforms
- (v) Daily maintenance of farmer's profiles.
- (vi) developing/ adapting mobile applications to register and profile, farmers, value chain service providers and other participants.

31. **Preferred Qualifications and Experience:** Degree in ICT for Experts at least 5–7 years and for assistant operators at least 3 years of practical experience in developing IT/mobile applications for agriculture sector/extension services.

D. Package for Thematic Studies

32. A package sum for thematic studies is included under which a firm or individual consultants will be hired based on the topics and types of thematic studies to be commissioned - this will be determined during implementation.

33. The terms of reference for the package include responsibility for overall preparation and management of and high-level consultations on thematic studies related to strengthening implementation and informing evidence based policy advocacy on irrigation and agriculture pertinent to the whole sector – in support of the Integrated Participatory Development Management and Irrigation Project Knowledge Management Centre financed by IFAD. It is estimated that 4 experts and 3 research/data collection and administrative consultants will be required. The main tasks of 4 experts will include, but not limited to:

- (i) Review progress against sector indicators presented in the results framework.
- (ii) Identify institutional, technical and financial constraints that might affect the delivery of the sector indicators.
- (iii) As needed, prepare in depth analysis of the institutional, technical and financial constraints and prepare recommendations for improvement.
- (iv) Facilitate technical discussions among stakeholders to vet findings and recommendations of the in-depth studies.
- (v) Assess the level and adequacy of participation of various stakeholders in the planning, implementing and monitoring of project activities.

- (vi) Provide oversight monitoring and evaluation (M&E) of results based outputs Quality Control/Quality Assurance activities on program service, assess value of outputs for given inputs and build lessons learned into new activities and ongoing programs.
- (vii) Assist to conduct six-monthly workshops to discuss relevant issues related to progress, M&E, of the irrigated agriculture program.
- (viii) Assist to achieve compliance of program monitoring and evaluation outputs with the program design and relevant government and ADB guidelines.
- (ix) Identify regulations (planning, fund flow, role sharing etc.) that might need updating to accelerate the delivery of the government program for irrigated agriculture.
- (x) Prepare material for the national steering committee for water resources, including policy reforms.

34. **Preferred Qualifications and Experience.** For Experts: Master's degree in economics with exposure to water resources and agriculture development. She/he should have sufficient experience in the irrigation development and water resources development at least 7 years and familiar with rural economic potential. She/he should have experience in assisting the local and central government in planning and monitoring and policy advocacy.

35. The three administrative consultants will be responsible for desk research, data gathering, logistics management support, etc. Specific tasks include

- (i) Compile information and data relevant to the government irrigated agriculture program. This should be done in close collaboration with the ADB funded team in charge of the development of the irrigation data warehouse under the MPWH.
- (ii) Facilitate the preparation of technical discussions, including preparation of material and logistic.
- (iii) Support the expert team as needed.

36. For Administrative Consultants: University degree in water resources and agriculture development. Ability to research, gather data, undertake initial analysis. She/he should possess good organizational skills. All consultants should be able to speak and write English well

E. Terms of the Assignment

37. Experts will be based primarily in Jakarta, Indonesia and TAs districts for the duration of the assignment. The duration of the assignment is three years from the start date, expected to be around the first week of September 2017.

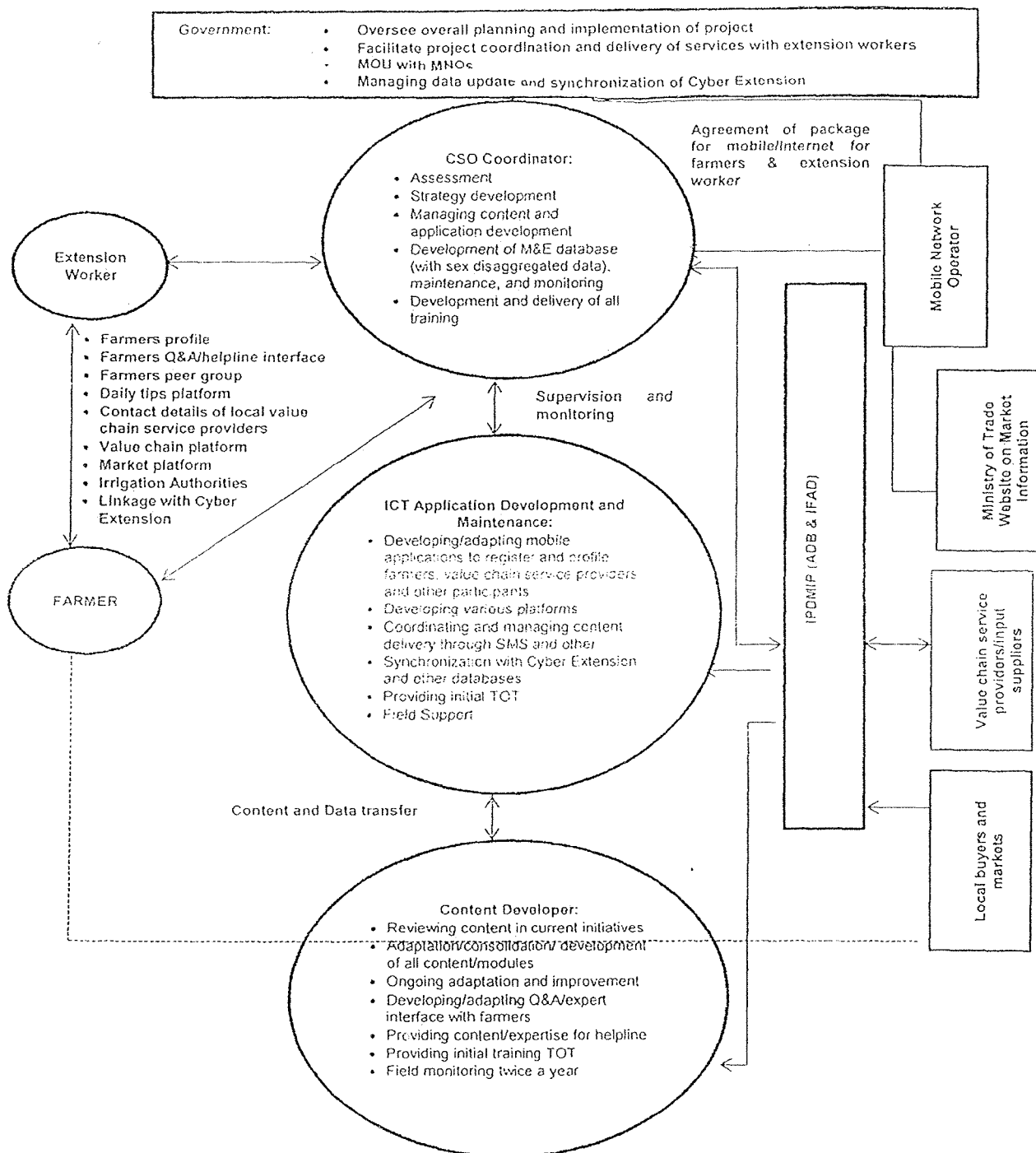
38. The firms will report to the ADB Team Leader/TA Officer for the TA and designated officials from the Government of Indonesia.

DETAILED PRODUCT SERVICES TO BE PROVIDED TO TECHNICAL ASSISTANCE
BENEFICIARIES

Product services will include among others:

- (i) weekly location-specific weather forecasts service;
- (ii) price information of commodities in the closest wholesale markets;
- (iii) location-specific availability of agricultural inputs (seeds, fertilizer, pesticides, etc.);
- (iv) techniques and technologies to increase productivity and soil and water management relevant to specific crops;
- (v) contact information of extension agents, input suppliers, markets or buyers and financiers (for access to credit locally);
- (vi) customized extension support (voice communication) to farmer queries by mobile applications backed by helpline with expert support and a framework for implementing the helpline;
- (vii) develop platforms to interface with farmers and/or peer groups, value chain service providers, irrigation authorities, and markets or buyers;
- (viii) irrigation-related periodic report and repair work status;
- (ix) develop and implement a knowledge management approach for above collected data to generate useful reports for public and private agriculture extension and related stakeholders, including databases on farmer profiles, queries, and survey reports; and
- (x) a mechanism to monitor and rate the performance of mobile applications, the help line and quality of their advice.

STAKEHOLDER IMPLEMENTATION CHART FOR THE TECHNICAL ASSISTANCE



ADB = Asian Development Bank, ICT = information and communication technology, IFAD = International Fund for Agricultural Development, M&E = monitoring and evaluation, MOU = memorandum of understanding, MNO = mobile network operator, Q&A = question and answer, SMS = short message service, TOT = training of trainer

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

NOMOR: 243 /Dt.8.1.ND/11/2017

Yth. : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral.
Dari : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan
Hal : Tanggapan Terkait *Agricultural Value Chain Development Project (Loans) and Inclusive and Climate Resilient Coffee Value Chain (TA)*
Tanggal : 6 November 2017

Berdasarkan Nota Dinas Saudari No. 464/Dt.8.4.ND/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Permohonan Tanggapan Terkait *Agricultural Value Chain Development Project (Loans) and Inclusive and Climate Resilient Coffee Value Chain (TA)*, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman dan hibah ADB kepada pihak privat/swasta (PT Dharmapala Usaha Sukses (PT. DUS) anak Perusahaan *Olam International Limited (OIL)* Singapura) tidak diatur dalam PP No.10/2011 Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pemerintah, karena pinjaman dan hibah tersebut merupakan *window private* ADB kepada privat/swasta di Indonesia.
2. Namun demikian, pengadaan pinjaman dan hibah ini perlu menjadi perhatian Kedeputan/Direktorat sektor terkait, karena ruang lingkup yang dikerjasamakan berhubungan dengan upaya perencanaan target SDGs di Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudari diucapkan terima kasih.

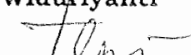


Teni Widuriyanti

Tembusan Yth.:
Direktur Pangan dan Pertanian

LEMBAR EDARAN

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Nomor Agenda	Diterima Tanggal	Tingkat Surat
1478/Dt.8.1/11/2017	01 Nopember 2017	Rahasia / Segera / Biasa
Diterima dari : Direktorat Multilateral No. / Tgl Surat : 464/Dt.8.4.ND/10/2017 31 Oktober 2017 Perihal : Permohonan Tanggapan Terkait Agricultural Value Chain Development Project (Loan) and Inclusive and Climate Resilient Cofee Value Chain (TA)		
Diteruskan Kepada :		Disposisi :
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Tati Lies Aryati <input checked="" type="checkbox"/> 2. Riza Hamzah <input type="checkbox"/> 3. Mukhtiali <input type="checkbox"/> 4. Sugeng Wahyu Hendarto <input checked="" type="checkbox"/> 5. Beby Hanzian <input type="checkbox"/> 6. Yustina Handayani Wijayanti <input type="checkbox"/> 7. Tien Iswartini <input type="checkbox"/> 8. Dadan Kusdarsana <input type="checkbox"/> 9. Ino Sutrisno Staf Pendukung <input type="checkbox"/> 1. Firman Perangin-angin <input type="checkbox"/> 2. Adi Nurhadi <input checked="" type="checkbox"/> 3. Eftin Ula Kurnia <input checked="" type="checkbox"/> 4. Sahna Putri Aselira <input checked="" type="checkbox"/> 5. Bonataon M.T.V. Simandjorang <input type="checkbox"/> 6. Pristi N.K. Panggabean <input type="checkbox"/> 7. Kristianto Wibowo <input checked="" type="checkbox"/> 8. Muhamad Faisal Siddiq <input type="checkbox"/> 9. Derry Afriandri <input type="checkbox"/> 10. Reezali Raharjaya <input type="checkbox"/> 11. Faizah Aulia Rahmah		<input type="checkbox"/> Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/> Untuk Dikoreksi <input type="checkbox"/> Teliti/Pendapat dan Laporkan <input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban <input type="checkbox"/> Dibahas Bersama <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Untuk Dipergunakan <input type="checkbox"/> Ikuti Perkembangan <input type="checkbox"/> Copy dan Kembalikan <input type="checkbox"/> Hadiri/Wakili <input type="checkbox"/> Untuk di File
Catatan : <p>a) ini proses program window private ADB & private di Indonesia. Pemerintah gak mengantar private to private, alihkan mengacu pada operasi investasi yg ada.</p> <p>b) tugas pemerintah meninjau konkan program yg dirap kan Kantor.</p> <p>c) catat mekanisme ini yg jd masukan</p> <p style="text-align: right;">Teni Widuriyanti  2/11/2017</p>		